



***Collaborative Governance* dalam Mengurangi Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri di Kabupaten Karawang**

Zahra Syalsabila¹, Gili Argenti²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 21 Juni 2022

Revised: 25 Juni 2022

Accepted: 27 Juni 2022

Abstract

One of the largest industrial cities, namely Karawang Regency, also experienced this. Therefore, the Karawang regency government is also thinking of an effort that is able to control the spread of covid 19 in industrial clusters, because the industrial cluster in Karawang Regency is the largest industrial cluster affected by the spread of covid 19. in this case the author is researching related to collaborative government in an effort to prevent the spread of covid 19 in the industrial sector in Karawang Regency in 2021. This research uses a descriptive qualitative approach and is coupled with Ansell and Gash's theory with 4 indicators, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. In this study, it focuses on the efforts made by the Karawang Regency Government with government agencies related to the industrial sector to provide handling in tackling the spread of covid 19, besides explaining the role of private parties such as the Indonesian Company Association to help handle the problem of the spread of covid. 19

Keywords: *Collaborative Governance, Covid19, Karawang*

(*) Corresponding Author: zahrasyalsabila30@gmail.com

How to Cite: Syalsabila, Z., & Argenti, G. (2022). Collaborative Governance in Reduce the Impact of The Spread of The Covid-19 Pandemic on the Industrial Sector in Karawang Regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 106-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6791713>

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif (www.wartaekonomi.co.id diakses pada Kamis, 8 April 2021). Dalam hal ini salah satu sektor yang mengalami dampak yang besar adalah sektor industri. Menurut I Made Sandi (1985:148), industri merupakan usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku ataupun bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dengan jumlah besar sehingga barang tersebut diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Dalam hal ini terkait dengan penunjang perekonomian salah satu yang berperan sangat aktif dalam mendorong roda ekonomi adalah sektor industri, namun yang menjadi masalah adalah ketika sektor industri menjadi terhambat karena adanya pandemi Covid -19 tentu saja roda perekonomian menjadi terganggu. Hal tersebut diakibatkan oleh sulitnya pembatasan untuk mengurangi interaksi individu dengan individu didalam lingkungan industri. Dimana dalam hal ini sektor industri merupakan sektor yang sangat banyak di isi oleh individu jadi sangat sulit untuk membatasi hal itu.

Di Indonesia Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas sektor industri. Imbas dari hal itu antara lain penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, penyusutan permintaan, serta pengurangan tenaga kerja akibat penurunan kapasitas produksi (www.kemenperin.co.id diakses pada Kamis, 8 April 2021). Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Sebab Bila hal ini terus berlanjut tentu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara. Selain itu dalam hal ini dampak yang buruk juga akan dirasakan para pekerja, hal itu dikarenakan adanya ancaman pemutusan kerja disaat proses produksi berhenti dalam beberapa waktu. Hal itu tentu saja terjadi mengingat perusahaan bukan lembaga sosial yang akan memberikan sesuatu kepada pekerja meskipun tidak ada proses produksi.

Menurut data dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Di Provinsi Jawa Barat dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa pada sektor industri hal itu dapat terlihat dari banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, Pada 20 November 2020 jumlahnya mencapai 99.535 orang. Berdasarkan data Disnakertrans Jawa Barat, jumlah tenaga kerja di Jawa Barat yang dirumahkan pada periode tersebut mencapai 80.151 dari 987 perusahaan, lalu jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 19.089 dari 460 perusahaan (www.merdeka.com diakses pada Rabu, 31 maret 2021).

Kabupaten Karawang yang juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat Juga mengalami dampak pandemi covid-19 yang sangat besar pada sektor industri. Dalam hal ini Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang Fitra Hergyana menyebutkan bahwa penyebaran virus corona terbanyak di dominasi oleh sektor industri dalam hal itu juga akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik” (www.bandung.bisnis.com diakses pada 5 maret 2021)

Adapun penyebaran Pandemi Covid-19 klaster industri terjadi dikarenakan minimnya kesadaran beberapa perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada para pekerjanya sehingga penyebarannya menjadi cepat khususnya perusahaan yang masih kecil, hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pelaporan apabila ada kasus pandemi Covid-19 dengan tujuan mengurangi dampak penyebaran yang lebih besar diperusahaannya dimana hal itu diungkapkan oleh kepala Disnakertrans Jawa Barat(www.merdeka..comdiakses pada Jumat,14 mei 2021).

Tentu saja dalam hal ini apabila protokol kesehatan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dampak penyebaran akan bisa terkontrol, seperti layaknya di perusahaan-perusahaan besar yang ada dimana dalam hal ini menurut laporan Disnakertrans ada beberapa penurunan di beberapa perusahaan besar di Kabupaten Karawang.

Tentu saja dalam hal ini penyebaran virus covid-19 terlihat sangat masif pada klaster industri yang tentu saja membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja, dalam hal ini bisa dilihat harus ada upaya untuk melindungi kesehatan pekerja/buruh. Dalam hal ini hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja telah dijamin di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan). Hal itu juga sesuai dengan Pasal 86 UU Ketenagakerjaan

yang berisi penjelasan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Berdasarkan hal itu keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh harus diperhatikan jangan sampai mereka menjadi korban di tempatnya mencari Nafkah untuk keluarganya. Namun dalam hal ini disadari betul bahwa penanganan covid 19 bukan masalah yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dimana dalam hal ini memerlukan kerjasama dari berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan hal ini. Dalam hal ini konsep *collaborative governance* dapat digunakan untuk mendorong terciptanya suatu cara atau kebijakan yang mampu mengakomodir terkait dengan upaya pengurangan dampak penyebaran covid-19 pada klaster industri di Kabupaten Karawang.

METOOODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan untuk bisa melakukan penelitian yang komperhensif, adapun beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti denggan melakukan observasi lapangan, wawancara dengan pihak yang memiliki informasi terkait data yang ingin diteliti, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori milik Ansell dan Gash dengan empat indikator yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusi, dan proses kolaborasi. Terkait alasan memilih teori tersebut dikarenakan bahwa peneliti beranggapan bahwa teori tersebut dinilai sesuai dengan kondisi yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance Dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19 Pada Sektor Industri Di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Aspek Kondisi Awal

proses penyebaran covid-19 dilingkungan industri Kabupaten Karawang tentunya dikarenakan penyebaran covid-19 yang sangat cepat dan sulit untuk dilakukan tracing. Selain itu penyebaran ini bisa berlangsung dilingkungan industri dikarenakan proses kontak tubuh yang terjadi dilingkungan tersebut memang sangat intens sehingga memudahkan penyebaran covid-19 di ruang lingkup industri.

Penyebaran covid-19 memanglah sangat sulit dikontrol namun dengan menerapkan protokol kesehatan setidaknya diharapkan untuk bisa menguraangi dampak penyebaran covid-19 khususnya di lingkungan industri Kabupaten Karawang. Peran dari penerapan protokol kesehatan yang ketat disertai dengan pengawasannya akan sangat berpengaruh pada proses untuk memutus penyebaran covid-19 yang ada di lingkungan industri.

Namun bila melihat secara keseluruhan melalui sebuah rangkaian kondisi masyarakat baik itu pekerja ataupun siapapun hanya bisa menjaga diri dari proses penyebarannya saja namun terkadang ada indikasi bahwa beberapa orang yang terpapar namun tetap bisa biasa saja dikarenakan imun yang kuat, adapun orang-orang tersebut adalah mereka yang sering disebut orang tanpa gejala (OTG), orang tanpa gejala sendiri yang terkadang mampu menyebarkan virus ini meskipun terlihat sehat oleh karena itu penerapan protokol kesehatan bahkan untuk orangh terlihat sehat juga harus dilakukan secara ketat.

Dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan terus berharap bahwa pengawasan terhadap protokol kesehatan dan kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang

bekerja dilingkungan industri harus terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak penyebaran covid-19 ini. Sebab covid-19 ini sudah merugikan banyak pihak baik dari segi kesehatan ataupun Financial masyarakat, oleh karena itu apabila kita bersama-sama berupaya menyelesaikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik semoga permasalahan covid-19 bisa segera diatasi.

Dampak dari covid.19 terhadap lingkungan industri di Karawang sangatlah besar. baik dari segi ekonomi maupun kesehatan para pekerja/buruh, oleh karena itu pemerintah berupaya keras untuk mendorong adanya peningkatan terhadap protokol kesehatan agar para pekerja tersebut bisa tetap bisa menjalankan proses produksi dan terhindar dari penyebaran covid.19 tersebut. Selain itu ada tanggapan dari salah satu pekerja disana yang menyatakan bahwa masa-masa awal covid 19 meningkat merupakan masa yang sangat sulit, hal itu dikarenakan dirinya terpaksa diliburkan sementara dan hanya mendapatkan gaji hanya setengah dikarenakan produksi yang tidak berjalan

Suatu permasalahan yang sangat dirasakan oleh para pekerja pada saat itu dari perasaan takut akan dikeluarkan oleh perusahaan, namun nyatanya banyak perusahaan yang hanya meliburkan karyawannya sementara dengan konsekuensi adanya pemotongan gaji sementara sampai proses produksi kembali berjalan kembali. Namun tetap saja kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari harganya juga tidak turun bahkan ada beberapa yang naik sehingga banyak pekerja yang harus mengatur keuangannya sehemat mungkin.

Pandemi covid 19 merupakan suatu dampak dari efek domino yang akan dirasakan semua pihak, hal ini dapat terlihat dari semua sektor yang mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan untuk menjalankan proses-proses produksi dan distribusi. Hal ini tentunya akan membuat banyak perusahaan merugi dan akan berdampak pada karyawan oleh karena itu penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan agar penyebaran tersebut bisa dikendalikan. dampak dari covid 19 ini terasa untuk semua sektor, dan untuk sektor industri sendiri pasti sangat merasakan dampak covid 19 ini salah satunya dikarenakan karena mobilitas dan interaksi pekerja yang sangat tinggi yang mampu menyebabkan terjadinya penyebaran covid 19 dengan sangat cepat. Oleh karena itu apabila ingin proses produksi berjalan maka harus dibuat suatu mekanisme kerja yang sangat menerapkan protokol kesehatan agar penyebarannya bisa di control.

Bila berkaca pada indikator kondisi berdasarkan teori milik Ansell dan Gash (2007: 61) bisa dilihat bahwa ada suatu perubahan situasi dalam sektor industri yang akhirnya mempengaruhi kehidupan para pekerja dalam sektor tersebut. Dimana dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk membatasi penyebaran pandemi tersebut agar para pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Selain itu para pekerja juga mendapatkan banyak hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan sempat berjennya produksi yang akhirnya menyebabkan mereka sebagian ada yang dimkeluarkan dari pekerjaan ataupun diliburkan sementara sampai kondisi membaik dan proses produksi bisa berjalan kembali.

Collaborative Governance dalam pencegahan penyebaran covid 19 pada klaster industri di Kabupaten Karawang dilihat dari aspek Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam kepemimpinan fasilitatif terkait dengan pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Karawang berfokus pada Satuan Tugas Covid 19. Dalam

hal ini Satgas covid yang ada di kabupaten Karawang mengevaluasi dan mengawasi terkait interaksi di berbagai tempat untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran covid 19 bisa dikendalikan. Terkait dengan hal tersebut Satgas covid 19 juga mengawasi terkait dengan pengawasan pada sektor industri. Hal ini terlihat pada setiap perusahaan yang terindikasi memiliki kasus penyebaran covid 19 harus memberikan laporan dan juga mendorong perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi dari Satgas ataupun dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Satgas covid-19 yang mengakomodir terkait dengan semua pihak yang terkait dalam proses pengawasan dalam mengurangi dampak penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang. Selain itu nantinya Satgas covid juga akan senantiasa memberikan laporan kepada Bupati Karawang untuk mengabarkan terkait dengan perkembangan pencegahan penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang. Selain itu Dinas kesehatan kabupaten karawang juga terus berupaya untuk melihat kinerja dari proses pencegahan penyebaran covid 19 itu dengan ditugaskan untuk memberikan laporan terkait perkembangan penyebaran dampak covid 19 kepada masyarakat melalui website miliknya ataupun website satgas covid 19 di Kabupaten karawang.

Dalam hal ini setiap instansi yang terlibat diharapkan mampu untuk senantiasa mendorong proses pengawasan, hal itu terlihat dari pesan yang disampaikan oleh perwakilan dinas kesehatan tersebut. Jadi selama proses pencegahan pengurangan dampak penyebaran covid 19 tersebut semua pihak yang terlibat baik itu dari Satgas dan seluruh instansi lainnya menjalankan tugas pengawasannya dengan sebaik mungkin. Selain itu bukan hanya pihak dari instansi Pemerintah saja yang harus terlibat, dikarenakan untuk pencegahan di klaster industri dibutuhkan kerjasama juga dengan pihak luar juga seperti pihak-pihak perusahaan.

Pihak perusahaan juga menyambut baik pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut. Sebab besar harapan mereka apabila proses pengawasan dan tracing covid 19 bisa berjalan baik maka nantinya mereka akan lebih cepat memulai proses produksi kembali dengan standar operasional Produksi yang sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Proses pencegahan ini dapat berlangsung dengan baik apabila pemimpin daerah mampu mengontrol dan menyakinkan masyarakat untuk senantiasa mengikuti peraturan pemerintah sebagai mestinya.

Penyesuaian peraturan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya bagi mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang. Hal ini dikarenakan apabila penyesuaian tidak dilakukan dan para pekerja terpaksa bekerja di tengah pandemi maka tentunya akan membuat suatu proses pencegahan yang buruk, hal ini dikarenakan jangan sampai ada pekerja yang memaksakan dirinya untuk bekerja dari pada takut diliburkan sementara dan nantinya takut di pecat. Namun tentunya hal itu bisa dilakukan oleh proses tracing atau pengecekan kesehatan pegawai secara berkala untuk memastikan penyebaran covid bisa dikendalikan.

Bila berkaca pada indikator Kepemimpinan fasilitatif berdasarkan teori milik Ansell dan Gash (2007: 67) bisa dililat bahwa ada suatu perencanaan yang

harus dibuat dari semua pihak terkait agar bisa menjalankan protokol kesehatan dan mendorong semua pihak untuk tetap mentaati peraturan yang pemerintah sudah buat. Dalam hal ini tentunya semua pihak yang terlihat dalam pencegahan penyebaran covid 19 dilingkungan klaster industri harus mampu bisa menjamin kehidupan para pekerja agar mereka tetap bisa mendapatkan jaminan atas kehidupan yang mereka jalani selama hidup dalam pandemi covid 19 sebab apabila tidak maka akan ada pelanggaran-pelanggaran yang terpaksa mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan hidup dimasa pandemi covid 19 ini. Namun meskipun begitu kepadatan yang terjadi didalam klaster indutri memang membuat sulitnya penanganan untuk pencegahan penyebaran covid 19. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak untuk berkolaborasi agar bisa menyelesaikan ini khususnya dari Pemerintah Daerah itu sendiri.

Governance Dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19 Pada Sektor Industri Di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Aspek Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam pencegahan penyebaran covid 19 pada klaster industri tentunya akan berfokus pada upaya Satgas Covid 19 yang ada di Kabupaten Karawang. Terkait dengan Satgas Covid 19 ini terdiri dari gabungan perwakilan Dandim, Polres, Satpol PP, dan anggota Satgas Covid. Adapun pihak lain yang terkait adalah tentunya untuk mendorong proses pencegahan penyebaran covid 19 ini agar lebih efisien. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak Apindo yang tentunya diminta untuk membantu untuk mampu mendorong perusahaan-perusahaan yang ada dalam manajemen organisasi tersebut.

Dorongan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Satgas Covid 19 Kabupaten Karawang untuk mengajak pihak terkait seperti pihak-pihak perusahaan untuk bisa mendorong penanganan covid 19 ini menjadi lebih cepat. Selain itu memang dalam penanganan covid 19 ini khususnya pada klaster industri tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja harus ada koordinasi dari semua lini untuk bisa mengatasi hal tersebut, hal itu bertujuan agar mempercepat proses penanganan covid ini menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 33 tahun 2020 dijelaskan bahwa semua elemen baik pemerintahan dan seluruh pihak terkait diharuskan menjaga diri dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu dijelaskan dalam peraturan tersebut apabila ada pihak-pihak yang tidak mendukung atau sengaja melanggar peraturan protokol kesehatan yang dilalakukan oleh pemerintah maka akan dijatuhkan sanksi.

Dalam perihal penanganan penanggulangan covid 19 di Kabupaten Karawang semua instansi terkait berupaya untuk mengatasi termasuk instansi yang terkait dengan perindustrian, terkait dengan ini dinas yang bertanggungjawab atas kontrol terhadap perusahaan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mengacu pada hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak Satgas Covid 19. Satgas Covid 19 Kabupaten Karawang berupaya untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak untuk bisa mengurangi dampak penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah dikarenakan dalam prosesnya tentunya terdapat kendala dalam melaksanakan hal tersebut. Namun hal tersebut harus menjadi sebuah tantangan yang harus dipecahkan bersama agar proses pencegahan pengurangan penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang bisa lebih di

Kendalikan khususnya pada klaster industri yang merupakan klaster dengan tingkat penyebaran covid 19 yang paling tinggi di Kabupaten Karawang.

Begitu juga terkait dengan penanganan covid 19 khususnya di Kabupaten Karawang, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Satgas Covid 19 Kabupaten Karawang harus menjadi motor penggerak yang mampu menerapkan protokol kesehatan terhadap masyarakat dan khusus untuk klaster industri Pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi buruh / pekerja di perusahaan-perusahaan di daerahnya. upaya penanganan yang baik juga bergantung pada keseriusan semua pihak yang terikat dalam penanganan pencegahan penyebaran kasus covid 19 tersebut.

Selain itu dalam hal ini Pemerintah daerah dan Satgas covid juga harus bekerja sama baik dengan pihak internal yaitu dinas terkait ataupun dengan pihak eksternal seperti lembaga perusahaan seperti Apindo untuk senantiasa menjalankan kerja sama yang baik dan efektif untuk penanganan covid 19 khususnya di kawasan industri yang berada di Kabupaten Karawang. Sebab dalam hal ini yang paling penting adalah kesehatan para pekerja dimana apabila hal itu bisa diperhatikan dengan baik maka proses produksi akan berjalan dengan normal kembali meskipun dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Bila berkaca pada indikator desain institusi berdasarkan teori milik Ansell dan Gash (2007: 70) bisa dilihat bahwa dibutuhkan suatu wadah untuk mampu menjadi bagian dari pengawasan dalam proses pencegahan penyebaran covid 19 pada klaster industri. Dalam hal ini Satgas covid 19 dan pemerintah daerah diharuskan mengakomodir semua pihak baik internal maupun eksternal, terkait dengan ini pihak internal seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalu untuk pihak eksternal adalah pihak perusahaan yaitu pihak Apindo. Diharapkan kerjasama tersebut mampu mendorong terciptanya suatu mekanisme yang mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga mampu membuat proses pencegahan penyebaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan proses kinerja bisa berjalan dengan normal kembali.

***Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19 Pada Sektor Industri Di Kabupaten Karawang Dilihat Dari Aspek Proses Kolaborasi**

Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara semua instansi yang berkaitan dengan *collaborative government* dalam penanganan covid 19 di sektor industri yang ada di Kabupaten Karawang semua pihak berupaya untuk senantiasa memaksimalkan kapasitas yang mereka miliki. Dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk mengakomodir setiap perusahaan untuk memperhatikan protokol kesehatan yang ada, serta melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Selain itu perusahaan-perusahaan tersebut juga diharuskan memberikan laporan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila ada indikasi penyebaran covid 19 di perusahaan yang mereka miliki.

Suatu tujuan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa memastikan pengontrolan dalam penyebaran covid 19 dilingkungan klaster industri yang ada di Kabupaten Karawang. Selain itu bisa diketahui bahwa Dinas tersebut juga menjalin kerja sama dengan Satgas Covid untuk pengawasan di ruang lingkup perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Tentunya hal ini

menjadi bagian dari proses kolaborasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan industri di Kabupaten Karawang.

Meskipun demikian pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengakui ada kesulitan dalam melakukan tracing terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, adapun hal itu terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang ditambah banyaknya pekerja yang ada didalam perusahaan tersebut. Hal itu tentunya membuat proses indikasi untuk pencegahan terkadang lambat untuk dilakukan. Namun pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengakui bahwa semenjak seringnya test covid 19 dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang maka penyebaran covid 19 mulai bisa dideteksi dan dikendalikan.

Dalam prosesnya pihak Dinas Perindustrian juga senantiasa memberikan laporan terkait dengan angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang khususnya untuk klaster industri. Hal itu bertujuan agar Dinas Kesehatan mempunyai data terkait dengan penyebaran covid 19 di klaster industri yang ada di Karawang. Sehingga dengan data olahan tersebut diharapkan Pemerintah daerah mampu memberikan instruksi yang tepat untuk melakukan langkah penanggulangan penyebaran covid 19 khususnya di klaster industri yang ada di Kabupaten Karawang

Diperlukan suatu data untuk mengontrol penyebaran covid 19 di Kabupaten Karawang khususnya di klaster industri. Tentunya data- data tersebut bisa digunakan untuk menentuiukan suatu langkah yang tepat dalam menangani permasalahan penyebaran covid 19 yang ada di Kabupaten Karawang pada klaster industri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga senantiasa mengupdate data penyebaran covid 19 terbaru supaya mampu menunjukkan hasil dari suatu kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan pencegahan penyebaran covid 19 dan apabila ditemukan suatu kendala maka bisa dilakukan evaluasi untuk membuat suatu langkah lain yang lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran untuk pencegahan penyebaran covid 19 tersebut.

Selain itu pihak perusahaan juga mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta kontrol terhadap penyebaran covid 19 pada klaster industri di Kabupaten Karawang. Hal itu terlihat dari pernyataan pihak Apindo yang mengatakan bahwa kami juga berusaha untuk mendorong semua pihak perusahaan untuk melaksanakan pencegahan penyebaran covid 19 di klaster industri dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan proses produksi yang ada di perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa “*collaborative goverment dalam pencegahan penyebaran covid 19 pada sektor industri di Kabupaten Karawang*” dapat dinilai dari 4 aspek yaitu .kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusi, dan proses kolaborasi

a) Kondisi Awal

Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2007: 61) terkait dimensi Kondisi awal bisa dilihat penyebaran covid 19 pada sektor industri di Kabupaten Karawang membutuhkan suatu penanganan dari banyak pihak

terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Satuan Tugas covid 19, pihak eksternal seperti Apindo, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan tracing dalam proses pencegahan penyebaran covid 19 pada sektor industri. Selain itu sektor industri merupakan cluster penyebaran covid tertinggi sehingga membuat semua pihak yang terlibat untuk saling bekerja sama untuk bisa menangani permasalahan tersebut.

b) Kepemimpinan Fasilitatif

Berdasarkan teori Ansel dan Gash terkait dengan dimensi kepemimpinan fasilitatif dinilai sudah cukup optimal meskipun terdapat kekurangan. Dalam penanganan permasalahan penyebaran covid 19 pada sektor industri bisa dilihat bahwa peran penting dipegang oleh Satgas covid 19 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dalam hal ini pihak-pihak terkait tersebut saling berkolaborasi untuk menemukan suatu upaya yang tepat dalam pencegahan penyebaran covid 19 pada sektor industri. Oleh karena itu selain pihak internal pemerintahan, pihak eksternal juga ikut terlibat seperti Apindo dan masyarakat untuk bisa memutus mata rantai penyebaran covid 19 tersebut.

c) Institusional Desain (Desain Institusi)

Berdasarkan teori Ansel dan Gash terkait dengan dimensi Desain institusi dinilai masih sudah cukup optimal meskipun tidak ada satu organisasi khusus yang dibentuk untuk mengakomodir seluruh pihak yang ingin melakukan pencegahan terhadap penyebaran covid 19 pada sektor industri di Kabupaten Karawang. Dan mereka hanya bekerja sama didasarkan pada peraturan Bupati yang telah disepakati. Dan mereka saling bekerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing namun saling berkoordinasi.

d) Proses Kolaborasi

Berdasarkan teori Ansel dan Gash terkait dengan dimensi Proses Kolaborasi dinilai sudah cukup optimal hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat saling memahami terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu terus melakukan suatu pengawasan berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Terkait dengan proses kolaborasi yang dilakukan pengawasan lapangan dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Satgas Covid 19, dan untuk Dinas Kesehatan mengelola data penyebaran covid 19 yang ada. Dalam hal ini pihak eksternal di luar pemerintahan seperti Apindo juga mendukung agar proses penerapan protokol kesehatan juga diawasi dengan sebaik mungkin sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran covid 19 pada sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, Chris; Gash, Alison. 2008. *Collaborative governance in theory and practice*. journal of public administration

- Darsih. 2017. *Peranan Sektor Industri Kecil Batu Bata Press Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. Hal 960
- <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22062/Kemenperin-Pacu-Aktivitas-Industri-Tanpa-Abaikan-Protokol-Kesehatan#:~:text=Pandemi%20Covid%2019%20membawa%20dampak,kerja%20akibat%20penurunan%20kapasitas%20produksi.> (diakses pada Kamis, 8 April 2021)
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-pandemi-covid-19-25-ribu-karyawan-hotel-di-jabar-dirumahkan.html> (diakses pada Rabu, 31 Maret 2021)
- <https://bandung.bisnis.com/read/20210205/549/1352711/karawang-masih-zona-merah-covid-19-penyumbang-terbesar-dari-sektor-industri> (diakses pada Minggu, 2 Mei 2021)
- Islamy, L.O Syaiful. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama
- Simatupang, Violetta. 2015, *hukum kepariwisataan berbasis budaya tradisional*. PT. Alumni, Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Weber, et al. 2005. *Collaborating enforcement and endangered species : A framework for asesesing Collaborative problem solving capacity*. Journal society and natural research
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja /buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja